KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Parmusi : DPR Jangan Salahgunakan Kekuasaannya
Tanggal : Kamis, 20 Juni 2013
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Parmusi: DPR Jangan Salahgunakan Kekuasaannya

Jakarta, Pelita

Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP PARMUSI) menilai kekuasaan yang dimiliki DPR jangan disalahgunakan untuk menjadi alat yang menimbulkan tindakan yang tidak baik, sehingga perlu dicari tata cara untuk memposisikan lembaga legislatif tersebut.

"Kekuasaan itu membuka peluang untuk terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena itu Parmusi menilai perlu mencari tata cara bagi DPR namun di sisi lain tetap memiliki hak pengawasan dan anggaran," kata Ketua Umum PP PARMUSI) Bachtiar Chamsyah dalam konferesi pers hasil Musyawarah Kerja Nasional II Parmusi di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia mengatakan kekuasaan sebelum reformasi berpusat pada eksekutif, namun setelah itu ada pada lembaga legislatif. Peran DPR itu menurut dia lebih dominan dibanding pemerintah bahkan lebih berperan lebih aktif dalam menentukan anggaran pemerintah termasuk menetapkan alokasi anggaran di masing-masing kementerian.

"Bahkan perannya hingga penetapan alokasi program dalam Satuan Tiga hingga ke alokasi mata anggaran dan penempatan lokasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL)," ujarnya.

Kondisi itu, menurut dia mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dapat dilihat sebagai perangkat stimulus pembangunan nasional yang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun, dia mengatakan APBN telah digunakan untuk menjadi alat bagi-bagi "kue" keuangan nasional.

"Misalnya, dana yang diajukan Menteri Keuangan anggarannya Rp1.200 triliun maka Badan Anggaran DPR minta menjadi Rp1.300 triliun, sehingga Rp100 triliun sisanya menjadi dana optimalisasi dengan kata lain bahan 'bancakan' parpol. Praktiknya dengan bagi-bagi proyek tergantung jumlah anggota partai di parlemen," ucapnya.

Dia menjelaskan posisi DPR menyetujui anggaran dan proyek yang diusulkan pemerintah dan dibahas dalam Badan Anggaran dan Komisi. Menurut dia, Banggar DPR memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur keluar dan masuknya anggaran keuangan negara.

"Tidak heran banyak anggota Banggar diperiksa KPK karena disorot (pihak) yang memiliki kekuasaan," tukasnya.

Bachtiar menilai keadaan yang wajar apabila peran DPR dalam pengawasan pelaksanaan APBN menjadi sangat lemah. Untuk itu menurut dia, Parmusi mendesak agar peran lembaga-lembaga negara dijalankan secara ideal sesuai dengan prinsip tata laksana pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Dibagian lain Bachtiar mengusulkan agar kepala daerah khususnya gubernur dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. **(ant/did)**

RAKER JAKSA AGUNG *- Jaksa Agung Basrief Arief (berkacamata) menyimak pendapat dan pertanyaan anggota Komisi III saat mengikuti Rapat Kerja, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6). Raker ini di antaranya membahas peningkatan kinerja Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana khusus, upaya dalam mensukseskan Reformasi Birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian saat penanganan unjuk rasa dalam rangka penegakan hukum dan HAM.* ■ pelita/edm